

BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Yth. 1. Para Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
di
Tempat

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG
INDIKASI TARGET UNTUK PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG
MELAKSANAKAN KELAS BINA KELUARGA BALITA (BKB) TENTANG
PENGASUHAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

A. Latar Belakang

Dalam rangka percepatan penurunan *stunting* telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Peraturan Presiden ini menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting*. Terdapat lima pilar dalam strategi percepatan penurunan *stunting* yaitu:

1. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa.
2. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.
3. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa.
4. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
5. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Pada pilar kedua tentang peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan huruf b, melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan *stunting* pada output nomor 5 menargetkan di tahun 2024 persentase desa/kelurahan yang **melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) adalah 90 %**. Target tersebut memperkuat pentingnya pengasuhan 1000 HPK melalui BKB di desa/kelurahan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Mempercepat penurunan *stunting* melalui komunikasi perubahan perilaku keluarga pada pengasuhan 1000 HPK

2. Tujuan

Menyediakan indikasi target pelaksanaan kelas BKB tentang pengasuhan 1000 HPK di desa/kelurahan tahun 2022 – 2024.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari surat edaran ini meliputi:

1. Definisi operasional persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas BKB tentang pengasuhan 1000 HPK
2. Indikasi target nasional persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas BKB tentang pengasuhan 1000 HPK tahun 2022 - 2024
3. Indikasi target jumlah desa/kelurahan per provinsi yang melaksanakan kelas BKB tentang pengasuhan 1000 HPK tahun 2022 – 2024

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398).

E. Isi Surat Edaran

1. Memfasilitasi pembentukan BKB di semua desa/kelurahan yang belum memiliki kelompok kegiatan BKB, sebagaimana indikasi target yang tercantum pada Lampiran surat edaran ini.
2. Memfasilitasi kelas pengasuhan 1000 HPK melalui kelompok kegiatan BKB.
3. Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kelas pengasuhan 1000 HPK melalui BKB di desa/kelurahan.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 NOVEMBER 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K)



LAMPIRAN
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR ...1.7... TAHUN 2022
TENTANG
INDIKASI TARGET UNTUK PERSENTASE DESA/KELURAHAN
YANG MELAKSANAKAN KELAS BINA KELUARGA BALITA (BKB)
TENTANG PENGASUHAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN

- A. Definisi operasional persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas BKB tentang pengasuhan 1000 HPK adalah jumlah desa/kelurahan yang memiliki kelompok BKB

$$\sum \frac{\text{Jumlah desa/kelurahan yang memiliki kelompok BKB}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$$

- B. Indikasi target nasional persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas BKB tentang pengasuhan 1000 HPK tahun 2022 - 2024

Tahun 2022: 70%

Tahun 2023: 80%

Tahun 2024: 90%

- C. Indikasi target jumlah desa/kelurahan per provinsi yang melaksanakan kelas BKB tentang pengasuhan 1000 HPK tahun 2022 - 2024

N O	PROVINSI	Jumlah Desa/Kelurahan	Baseline Desa/Kelurahan yang memiliki kelompok BKB	Indikasi Target Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki kelompok BKB		
				2022	2023	2024
1	Aceh	6,511	3,036	4,558	5,209	5,860
2	Sumatera Utara	6,188	3,581	4,332	4,950	5,569
3	Sumatera Barat	1,170	925	819	936	1,053
4	Riau	1,884	667	1,319	1,507	1,696
5	Jambi	1,588	1,213	1,112	1,270	1,429
6	Sumatera Selatan	3,262	1,838	2,283	2,610	2,936
7	Bengkulu	1,513	1,288	1,059	1,210	1,362
8	Lampung	2,650	1,788	1,855	2,120	2,385
9	Kepulauan Bangka Belitung	393	315	275	314	354
10	Kepulauan Riau	417	229	292	334	375
11	DKI Jakarta	267	264	187	214	240
12	Jawa Barat	5,957	5,600	4,170	4,766	5,361
13	Jawa Tengah	8,565	7,000	5,996	6,852	7,709
14	DIY	440	425	308	352	396
15	Jawa Timur	8,506	7,698	5,954	6,805	7,655
16	Banten	1,552	960	1,086	1,242	1,397
17	Bali	716	640	501	573	644
18	NTT	3,353	1,216	2,347	2,682	3,018
19	NTB	1,150	880	805	920	1,035
20	Kalimantan Barat	2,150	466	1,505	1,720	1,935
21	Kalimantan Tengah	1,573	707	1,101	1,258	1,416
22	Kalimantan Selatan	2,008	1,466	1,406	1,606	1,807
23	Kalimantan Timur	1,038	473	727	830	934
24	Kalimantan Utara	482	109	337	386	434
25	Sulawesi Utara	1,839	436	1,287	1,471	1,655
26	Sulawesi Tengah	2,027	1,054	1,419	1,622	1,824
27	Sulawesi Selatan	3,060	2,301	2,142	2,448	2,754
28	Sulawesi Tenggara	2,300	1,417	1,610	1,840	2,070
29	Gorontalo	730	446	511	584	657
30	Sulawesi Barat	649	399	454	519	584
31	Maluku	1,234	523	864	987	1,111
32	Maluku Utara	1,181	650	827	945	1,063
33	Papua	5,521	300	3,865	4,417	4,969
34	Papua Barat	1,837	251	1,286	1,470	1,653
	NASIONAL	83,711	50,561	58,598	66,969	75,340

sumber data: siga.bkkbn.go.id diunduh 4 Agustus 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Dr. (H.C.) dr. HASTO WARDOYO, Sp. OG (K)